PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DI DESA MANUNGGANG JAE KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bidang Ilmu Akhwal Al-Syakhsiyah

Oleh:

ISA YURIDA TANJUNG
NIM. 1610100007

JURUSAN AKHWAL AL-SYAKSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

TAHUN AJARAN 2020

PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DI DESA MANUNGGANG JAE KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bidang Ilmu Akhwal Al-Syakhsiyah

Oleh:

ISA YURIDA TANJUNG
NIM. 1610100007

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

DerminaDalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 20003 2005

JURUSAN AKHWAL AL-SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN AJARAN 2020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephone 0634-22080 Fax 0634-24022
Website : http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id e-mail : fasihiain@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Isa Yarida Tanjung

Padangsidimpuan, 31 Agustus 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Isa Yarida Tanjung** berjudul **"Peran Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kemampuan Suami Memberi Nafkah Di Desa Manunggang Jae Kota Padangsidimpuan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, SH, MH
NIP. 19710528 20003 2005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Isa Yurida Tanjung
NIM	: 1610100007
Jurusan	: Ahwal Syakhsiyah
Judul Skripsi	: Peran Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kemampuan Suami Memberi Nafkah Di Desa Manunggang Jae Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 31 Agustus 2020

METERAI TEMPEL 6000

Isa Yurida Tanjung
NIM. 1610100007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faxsimile (0634) 24022
Website: http://syariah.uin-padangsidimpuan.ac.id e-mail: fasih@uin-padangsidimpuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : **ISA YURIDA TANJUNG**
NIM : **16 101 00007**
Judul Skripsi : **Peran Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kemampuan Suami Memberi Nafkah Di Desa Manunggang Jae Kota Padangsidimpuan**

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP 19710528 200003 2 005

Ahmad Nijar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

Hasiah, M.Ag.
NIP 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 09 September 2020
Pukul : 08.30 WIB s/d 11. 00 WIB
Hasil/Nilai : 81,75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,69 (Tiga Koma Enam Sembilan)
Predikat : **Pujian**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – email: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-/In.14/D/PP.00.9/10/2020

Judul Skripsi : Peran Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kemampuan Suami Memberi Nafkah Di Desa Manunggang Jae Kota Padangsidimpuan

Ditulis Oleh : ISA YURIDA TANJUNG
NIM : 1610100007

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 26 Oktober 2020
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: ISA YURIDA TANJUNG
NIM	: 16 101 00007
Jurusan	: Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : "**PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DI DESA MANUNGGANG JAE KOTA PADANGSIDIMPUAN**", Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 31 Agustus 2020



ISA YURIDA TANJUNG
NIM. 16 101 00007

ABSTRAK

Nama :IsaYuridaTanjung

Nim :16 101 00007

Judul :Peran Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kemampuan Suami Memberi Nafkah Di Desa Manunggang Jae Kota Padangsidimpuan

Program keluarga Harapan (PKH) dimulai pada tahun 2007 dan sudah di laksanakan di wilayah Kota Padangsidimpuan mulai tahun 2013. Dan suami yang menerima PKH masih banyak mengabaikan posisinya sebagai kepala keluarga untuk melaksanakan kewajibannya dalam keluarga salah satunya memberi nafkah yang baik. Bahkan disaat keluarga tersebut menerima bantuan PKH suami tidak memanfaatkan bantuan itu dengan baik untuk dijadikan sebagai modal membuka usaha. Akibatnya keluarga yang menerima bantuan PKH tidak mampu untuk mensejahterakan ekonomi keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan kemampuan Suami Memberi Nafkah di Desa Manunggang Jae dan Bagaimana Peningkatan Kemampuan Suami Memberi Nafkah setelah mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Manunggang Jae.

Jenis penelitian yanng digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field Research)*, yaitu penyusunan akan terjun langsung kelapangan untuk meneliti suatu masalah, data yang digunakan adalah data primer dan skunder, metode pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan, dokumen, wawancara dan observasi langsung. Data-data yang terkumpul di analisis menggunakan metode deskriftif kualitatif yang bersifat induktif dan deduktif, yaitu suatu uapaya yang menemukan fakta-fakta yang ada serta menganalisanya sesuai dengan bahan kepustakaan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diperoleh hasil bahwa peran program keluarga harapan dalam meningkatkan kemampuan suami dan peningkatan kemampuan suami setelah mengikuti program keluarga harapan di desa manunggang jae dari hasil wawancara baik dari pendamping PKH, kepala desa manunggang jae, bidan desa manunggang jae dan penerima PKH dapat dinilai bahwa program keluarga harapan berperan penting bagi masyarakat desa manunggang jae dan mampu meningkatkan kewajiban suami memberi nafkah dengan adanya program keluarga harapan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: "***Peran Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kemampuan Suami Memberi Nafkah di Desa Manunggang Jae Kota Padangsidimpuan***" Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Hasiah, M.Ag Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Dermina Dalimunthe, S.H. M.H., pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.A.,selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Bahrum Tanjung dan Ibunda tersayang Masripa Siregar yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
9. Saudara-saudara saya, abanganda Rajib Karim Tanjung, Ali Usman Tanjung, Saprina Tanjung, Suharni Tanjung, Masidah Sukro Tanjung dan adik saya Ahmad Fahrur Roji Tanjung yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada kawan seperjuangan saya Aidil Syaputra Harahap, Hudansyah Tua, Riska Hidayanti Harahap, Nur Rahma Primaulina Pulungan, Koirunnisah Daulay, Rahwana Lubis, dan Ardian Syaputra Ritonga yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat keluarga besar Akhwal Al-Syaksiyah angkatan 2016, khususnya buat Zuanda Pakpahan, Muhammad Sahron, Ilham Marzuki Siregar, Ucok Sugiarto, Sahrul Ramadhan, Muhammad Ridwan Pasaribu, S.H., Gusti Gunawan Daulay, Ahmad Rizal, Adiansyah Rangkuti, Riski Marito Daulay, S.H., Mufida, Elma Ariska, dan Mita Aulia Lubis. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skrirpsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Agustus 2020
Penulis,

Isa Yurida Tanjung

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	NamaHuruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fatḥah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	I
ـُـ	Ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥahdanya	Ai	a dani
..... وْ	fatḥahdanwau	Au	a dan u

c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
..... اَـَـى	fatḥahdanalifatauya	ā	a dangarisatas
..ِ..ى	Kasrahdanya	ī	idangaris di bawah
....ُو	ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasiuntuk*TaMarbutah* ada dua.

a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah* dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah*atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال**.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah.*

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf*qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin.* Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

BERITA ACARA MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK .....

KATA PENGANTAR .....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....

DAFTAR ISI .....

DAFTAR LAMPIRAN.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah.....6
C. Batasan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian.....6
E. Kegunaan Penelitian 7
F. Penelitian Terdahulu.....7
G. Sistematika Pembahasan.....9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Demonstrasi.....11
B. Dasar Hukum Demonstrasi di Indonesia.....15
C. Demonstrasi Dalam Pandangan Islam.....20
D. Sejarah Praktek Demonstrasi Dalam Islam 24
E. Tujuan Demonstrasi 36
F. Prinsip-Prinsip dan Prosedur Demonstrasi.....40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....43
B. Jenis Penelitian.....43
C. Pendekatan Penelitian.....43
D. Sumber Data.....43
E. Teknik Pengumpulan Data 44
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pasal 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan Tahun 2019 46
1. Prinsip-Prinsip Demonstrasi 46
2. Prosedur Penyelesaian Demonstrasi 63
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 66
1. Azas Mengeluarkan Pendapat 66
2. Penyelesaian Demonstrasi Dalam Islam 71

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 75
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2007, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi problematika kemiskinan, kurangnya pendidikan, lemahnya perekonomian dalam masyarakat dengan membentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Kemiskinan merupakan masalah penting yang menjadi perhatian seluruh Negara, termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Kota Pdangsidimpuan mencapai 16.060 jiwa pada Maret 2019 dari jumlah penduduk yang berjumlah 221.827 jiwa. Tingginya angka kemiskinan menggambarkan belum berhasilnya upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.[1]

Bahkan dalam al-qur'an dianjurkan untuk menyantuni anak yatim dan orang miskin seperti disebutkan dalam qur'an surah al-Ma'un :

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحُضُّ عَلَىٰ
طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ
هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?,2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 4. Maka kecelakaanlah bagi

[1]Padangsidimpuan, Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa, 28 Januari 2020

orang-orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, 6. orang-orang yang berbuat riya[1603], 7. dan enggan (menolong dengan) barang berguna[1604].

Dari al-qur'an di atas menjelaskan bahwa kewajiban seorang muslim untuk menyantuni anak yatim dan pakir miskin, karena ancaman bagi mereka yang menodai agama Islam dengan cara menindas anak-anak yatim dan tidak menolong pakir yang meminta-minta. Indonesia memiliki beberapa masalah yang sangat urgen, diantaranya adalah di bidang social ekonomi.Masyarakat miskin menjadi kekurangan dan tidak mampu dalam menghadapi perkembangan zaman globalisasi saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka akan menghambat tujuan dan cita-cita Negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas Pemerintah harus berlaku adil karena Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain. Seperti dalam mendapatkan bantuan itu hendaknya berlaku jujur, amanah dan bertanggung jawab.Oleh karena itu, Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan.Masalah kemiskinan berdekatan dengan aspek-aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan sesuai ajaran Al-Qur‟an dan sunah Rosul. Tetapi sekarang ini banyak terjadi disekitar kita kasus-kasus dimana suami tidak berfungsi sebagaimana perannya dalam

keluarga. Suami sebagai kepala keluarga yang semestinya mampu melindungi dan mengayomi istri dan anak, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Kurangnya kasih sayang suami pada keluarga, menjadikan kebutuhan lahir maupun batin seorang istri dan anak tidak tercapai.

Sebagai seorang suami mestinya bisa mensejahterakan kembali ekonomi keluarganya setelah mendapatkan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah.Dan bukan hanya sekedar menerima bantuan tersebut tanpa memanfaatkannya sebagai modal dalam membuka usaha. Dengan kata lain suami harus membawa keluarganya keluar dari kemiskinandengan mengikuti program yang diberikan oleh Pemerintah.

Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang di tindak lanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 percepatan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan pemerintah membuat bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu :

a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melaluiakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluargamiskin dan rentan;
c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sertakesejahteraan sosial;[2]

[2]UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 percepatan penanggulangan kemiskinan

Sementara itu, pemerintah sudah menetapkan "sasaran penerima PKH yang merupakan keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial".[3]

Penerima bantuan ini adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan, jika tidak ada ibu maka nenek, tante/bibi, ataukakakperempuandapat sumber dana bantuan PKH yang diberikan kepada rumah tangga sasaran berasal dari APBN. Pada dasarnya mayarakat miskin memiliki kelemahan dalam kemampuan mencukupi kebutuhan hidup serta kemampuan berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi.[4]

Program keluarga Harapan (PKH) dimulai pada tahun 2007 dan sudah di laksanakan di wilayah Kota Padangsidimpuan mulai tahun 2013. Dan saat ini sudah terdapat dan telah berjalan di Desa Manunggang Jae Kota Padangsidimpuan yang menerima bantuan dari Pemerintah berupa "Program Keluarga Harapan (PKH)".[5]

Berdasarkan observasi dilapangan, penulis menemukan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) ini dari segi penyaluran masih kurang tepat sasaran. Berdasarkan wawancara awal kepada salah seorang warga yang

[3]Pedoman Pelaksaan Keluarga Harapan, Op. Cit, hlm. 26
[4]Ibid, hlm. 16
[5]Kementrian Sosial RI (2016b), Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2016. Jakarta, Indonesia

kurang mampu yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan pengahsilan yang tidak cukup untuk kebutuhan pokok mereka, rumah yang kurang layak keluarganya tempati dan masih mempunyai anak yang balita mengatakan bahwa rumahnya pernah di survei tetapi tidak mendapatbantuan baik berupa uang maupun kebutuhan pokok layaknya masyarakat lain yang mendapat bantuan.[6]

Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Manunggang Jae Kota Padangsidimpuan dapat mengurangi permasalahan yang ada di masyarakat. Diharapkan dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin yang ada di Desa Manunggang Jae untuk meningkatkan kualitas hidupnya terutama dalam peningkatan pendidikan dan kesehatan yang nantinya dapat menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi, guna mewujudkan cita-cita Negara Republik Indonesia menjadi Negara yang maju.

Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan.Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah pendududk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

[6]Putri Sofyan Sari, Masyarakat, *Wawancara*, Desa Manunggang Jae 13 November 2019

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Manunggang Jae Kota Padangsidimpuan masih kurang optimal dalam melaksanakan PKH. Dalam pemilihan orang-orang yang berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) masih kurang tepat terhadap sasaran, dimana masih banyak yang seharusnya menjadi sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) namun tidak ikut dalam penerimaan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain itu masih banyak suami yang mengabaikan posisinya sebagai kepala keluarga untuk melaksanakan kewajibannya dalam keluarga salah satunya member nafkah yang baik.Bahkan disaat keluarga tersebut menerima bantuan PKH suami tidak memanfaatkan bantuan itu dengan baik untuk dijadikan sebagai modal membuka usaha.Akibatnya keluarga yang menerima bantuan PKH tidak mampu untuk mensejahterakan ekonomi keluarga.Dengan ini Pemerintah berharap kepada pendamping PKH melakukan tugasnya dengan optimal dan kepada penerima PKH tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan mampu meningkatkan kewajiban suami sebagai kepala keluarga memberi nafkah keluarganya.

Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **"PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DI DESA MANUNGGANG JAE KOTA PADANGSIDIMPUAN".**

B. RumusanMasalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah tentang :

1. Bagaimana peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kemampuan suami memberi nafkah di Desa Maunggang Jae?
2. Bagaimana peningkatan kemampuan suami memberi nafkah setelah mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maunggang Jae?

C. TujuanPenulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kemampuan suami memberi nafkah di Desa Maunggang Jae.
2. Untuk megnetahui peningkatan kemampuan suami memberi nafkah setelah mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maunggang Jae.

D. KegunaanPenelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan berguna sebagai :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah keilmuan bagi pembaca dan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian lanjutan.
2. Menambah wawasan penulis untuk mengetahui Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kewajiban Suami Memberi Nafkah di Desa Manunggang Jae.

3. Memberikan masukan dan membangun pinsip masyarakat untuk lebih giat dalam mencari nafkah dan tidak hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah.
4. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam jurusan Akhwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam membuatskripsi ini, maka di buat batasan istilah sebagai berikut:

1. Program Keluaga Harapan (PKH) adalah sebagai rancangan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha dalam ketatanegaraan, perkonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.[7]
2. Kemiskinan merupakan kewajiban bagi seluruh manusia yang kaya raya untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka bagi kesejahteraan kaum fakir miskin. Pemberian sebagian kekayaan kepada fakir miskin dengan demikian merupakan wujud rasa syukur manusia kepada tuhan.
3. Masyarakat adalah sekumpulan orang dalam sebuah sistem tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya hanya antara individu dengan individu yang berada dalam kelompok tersebut.[8]

---

[7]Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,* Jakarta, Pemerintah Indonesia

[8]M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ibnu Sosial,* (Bandung :Eresco, t.th), hlm. 63

4. Nafkah adalah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak maupun keluarganya.
5. Manunggang Jae adalah salah satu desa di kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini terletak di pinggiran kota Padangsidimpuan.

F. Kajian Terdahulu

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Oleh karena itu penulis berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Skripsi Eni Ardianti Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Lulus tahun 2017 dengan judul *"Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang"*. Skripsi ini membahas implementasi Program Keluaga Harapan yang masih banyak mengalami masalah-masalah dan kendala-kendala dalam menjalankan Program Keluaga Harapan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.
2. Skripsi Cita Fauziatul Akmala Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Lulus tahun 2017 denganjudul *"Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan*

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung". Skripsi ini membahas tentang tahap intreprestasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi dalam implementasi Program Keluaga Harapan.

3. Skripsi Shella Yulia Rosalina Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Lulus tahun 2018 denganjudul *"Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyah Kota Semarang (Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam)".* Skripsi ini membahas pelakasanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yakni target penetapan sasaran calon penerima PKH. Pemilihan peserta Program Keluarga Harapan atau penerimaan manfaat berdasarkan rangking kemiskinan terendah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II penjelasan tentang istilah PKH, dasar hukum PKH, pengertian kemiskinan dan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri.

Bab III metode penelitian, Bb ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelohan data dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana peran PKH dalam meningkatkan kewajiban suami dalam member nafkah di Desa Manunggang Jae dan bagaimana peningkatan pemberian kewajiban suami dalam memberi nafkah setelah adanya PKH di Desa Manunggang Jae.

Bab V merupakan penutup, penulis mengutarakan saran dan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH (Program Keluarga Harapan) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program PerlindunganSosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan salah satu Program Pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, PKH sudah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2007. PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin, dengan tujuan akhir PKH adalah meningkatkan partisipasi sekolah baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah.

PKH merupakan program lintas kementrian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Pendidikan Nasional,

Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Imformatika dan Badan Pusat Statistik.[9]

Menurut Ulama di Desa Manunggang Jae Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negative, yang mana dampak positifnya lebih meringankan beban ekonomi masyarakat Desa Manunggang Jae. Namun dampak negatifnya lebih besar di bandingkan dampak positifnya. Dampak negative dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) menjadikan kepala rumah tangga atau suami di Desa Manunggang Jae malas dalam bekerja karena mengharapkan pencairan dana dari PKH itu sendiri.[10]

Ulama di Desa Manunggang Jae juga berpendapat bahwa pengertian PKH itu adalah sebuah program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang terjadi di masyarakat dan meringankan beban masyarakat yang tingkat ekonominya rendah kebawah agar tidak ketinggalan dengan masyarakat yang mempunyai ekonomis ederhana keatas, karen menurut ulama pemerintah membuat PKH ini salah satu untuk mewujudkan cita-cita Negara Republik Indonesia yaitu untuk menjadikan Indonesia Negara yang maju.[11]

---

[9]Dyah Ayu Virgoreta, dkk, "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat",* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No 12, hlm. 1-6

[10]Hasil wawancara atas nama Aliamin HSB, Tanggal 03-Desember-2019, Jam 20.00

[11]Hasil wawancara atas nama Khoiruslan Harahap, Tanggal 05-Desember-2019, Jam 08.30

Seluruh penerima PKH berhak menjadi penerima bantuan sosial berassejahtera (rastra) dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan bagianggota keluarga.Rastra diberikan sebanyak 10 kg per bulan. KetentuanPenerima Manfaat Bansos Rastra adalah sebagai berikut:

a. Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerahpelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM)Bansos Rastra yang namanya termasuk di dalam Daftar KPM danditetapkan oleh Menteri Sosial.

b. Sumber data KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu ProgramPenanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM yangmerupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun2015.

c. DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Datayang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No.284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016 yang diperbaharui melaluiSurat Keputusan Menteri Sosial No.30/HUK/2017 tanggal 16 Maret2017. Pokja Data terdiri dari: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

d. Daftar Penerima Manfaat (DPM) atau Daftar KPM Bansos Rastra disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota (c.q. Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsidan Kabupaten/Kota) melalui aplikasi SIKS-NG.

e. Untuk setiap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

1) Nama Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus Keluarga/Istri;
2) Nama Kepala Keluarga;
3) Nama Anggota Keluarga Lainnya;
4) Alamat Tinggal Keluarga;
5) Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM.[12]

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) :

a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melaluiakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluargamiskin dan rentan;
c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sertakesejahteraan sosial;
d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan

mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

[12]Direktorat Jaminan Sosial KeluargaDirektorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial KEMENTERIAN SOSIAL RI,*Pedoman Pelaksanaan PKH*, 2019, hlm. 31

3. Sasaran Program Kelurga Harapan (PKH)

“Sasaran PKH merupakan keluarga yang miskin dan rentan sertaterdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memilikikomponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial”.

4. Kriteria komponen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri atas:

   a. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
      1) ibu hamil/menyusui; dan
      2) anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
   b. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
      1) anak SD/MI atau sederajat;
      2) anak SMP/MTs atau sederajat;
      3) anak SMA/MA atau sederajat; dan
      4) anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yangbelum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
   1) lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh tahun); dan
   2) penyandang disabilitas berat.[13]

5. Dasar hukum PKH

Adapun dasar hukum Program Keluarga Harapan adalah:

a. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, tentang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 19: “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan,program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai ataumempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhikebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”.

b. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 3: “Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan,sandang dan perumahan; memperoleh pelayanan kesehatan danmemperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya”,Pasal 15: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawabmenyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan”, Pasal 16:“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikanbantuan biaya pendidikan atau beasiswa”.

[13]Ibid, hlm. 26-28

c. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial. Pasal 12 ayat 2-4: "Pemberian bantuan langsungberkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai ataupelayanan dalam panti sosial. Pemberian bantuan langsungberkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuanganNegara. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata caraserta jumlah pemberian uang tunai diatur dalam Peraturan Presiden".Pasal 13: "Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakandata yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan".
d. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, tentang PercepatanPenanggulangan Kemiskinan.
e. Inpres nomor 3 tahun 2010, tentang Program Pembangunan yangberkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan PelaksanaanProgram Keluarga Harapan.
f. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanKorupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan TransparansiPenyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah TanggaSangat Miskin (RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan.[14]

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan PKH terdiri atas:
1. penasihat nasional;
2. tenaga bantuan teknis;
3. tenaga ahli;
4. koordinator regional;
5. koordinator wilayah;
6. koordinator kabupaten/kota;
7. pekerja sosial supervisor;
8. pendamping sosial;
9. asisten pendamping sosial; dan
10. administrator pangkalan data.

[14]Munawwarah Sahib, *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan(PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*", (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), hlm. 33-34

Sumber daya manusia direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. Penggunaan sumber daya manusi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

7. Tugas dan Fungsi SDM PKH

Tugas dan fungsi SDM PKH secara umum adalah sebagai berikut:

1. Penasihat nasional

Penasihat nasional berada di bawah Direktorat Jaminan Sosial Keluargadan bertanggung jawab kepada Direktur Jaminan Sosial Keluarga.Penasihat nasional bertugas membantu pelaksana PKH pusat untukkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, lembaga internasional, dan memberikan masukan kebijakan strategis dalam pelaksanaan PKH.

2. Tenaga bantuan teknis

Tenaga bantuan teknis bertugas memberikan bantuan teknis padapelaksanaan PKH meliputi Validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, peningkatan kemampuan keluarga, dan sumber daya. Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019.

3. Tenaga Ahli

Tenaga ahli bertugas mendukung sub direktorat teknis terkait dalammenangani pelaksanaan PKH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, danevaluasi pelaksanaan PKH.

4. Koordinator Regional

Koordinator regional bertugas mendukung pelaksanaan PKH dalampelaksanaan PKH di tingkat regional dalam hal:

a. memastikan bisnis proses berjalan sesuai ketentuan di tingkatregional;

b. memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat regional;

c. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat regional;

d. pengelolaan penanganan pengaduan di tingkat regional;

e. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal darianggaran pendapatan dan belanja daerah;

f. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH di tingkat regional; dan

g. memberikan penilaian kinerja koordinator wilayah di wilayahkerjanya.

5. Koordinator Wilayah

Koordinator wilayah bertugas membantu kepala dinas sosial daerah provinsi dalam pelaksanaan PKH untuk:

a. memastikan bisnis proses berjalan sesuai ketentuan di tingkat daerah provinsi;

b. memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat daerah provinsi;

c. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi;

d. pengelolaan penanganan pengaduan di tingkat daerah provinsi;

e. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal darianggaran pendapatan dan belanja daerah;

f. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber dayamanusia PKH di tingkat daerah provinsi; dan

g. memberikan penilaian kinerja koordinator kabupaten/kota danadministrator pangkalan data di wilayah kerjanya.

6. Koordinator Kabupaten/Kota

Koordinator kabupaten/kota bertugas membantu kepala dinas sosial kabupaten/kota dalam pelaksanaan PKH, mengoordinasikan sumber daya manusia PKH di tingkat daerah kabupaten/kota dan memberikan penilaian kinerja pendamping sosial, asisten pendamping sosial dan administratorpangkalan data di wilayah kerjanya.

7. Pekerja Sosial Supervisor

Pekerja sosial supervisor bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilakukan oleh pendamping sosial diseluruh wilayah dampingan, melaksanakan manajemen kasus (*casemanagement*) dalam pelaksanaan P2K2, melakukan penanganan pengaduan masyarakat, dan mempromosikan pelaksanaan PKH melalui berbagai media.

8. Pendamping Sosial

Pendamping sosial bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH dikecamatan.

9. Asisten Pendamping Sosial

Asisten pendamping sosial bertugas membantu pendamping sosial dalam melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.

10. Administrator Pangkalan Data

Administrator pangkalan data bertugas mengumpulkan, memverifikasi,mengolah, dan mendistribusikan data PKH di pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.[15]

B. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kewajiban bagi seluruh manusia yang kaya raya untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka bagi kesejahteraan kaum fakir miskin. Pemberian sebagian kekayaan kepada fakir miskin dengan demikian merupakan wujud rasa syukur manusia kepada tuhan.[16]

[15]Pedoman Pelaksanaan Keluarga Harapan, OP. Cit, hlm. 56-58
[16]Zainuddin Ahmad, *Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 38

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program keluarga Harapan.[17]

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ataukeluarganya.

Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.[18]

Adapun kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister sesuai denganPermensos Nomor 146 Tahun 2013 adalah Rumah Tangga yang:

a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyaisumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuanmemenuhi kebutuhan dasar;
b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untukmemenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenagamedis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuksetiap anggota rumah tangga; dan
e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampaijenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

[17]Farida dan Sri, *"Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal", Vol 2, No 6 2018*
[18]Pedoman Pelaksaan Keluarga Harapan, Op. Cit, hlm. 30-31

f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembokdengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yangsudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengankondisi tidak baik/kualitas rendah;
h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengankondisi tidak baik/ kualitas rendah;
i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrikatau listrik tanpa meteran;
j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/orang; dan
k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air takterlindung/air sungai/air hujan/lainnya.[19]

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, duniausaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahterah,demokratis dan berkeadilan

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat startegi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut adalah sebagai berikut:

[19]Peraturan Mentri Sosial Nomor 146 Tahun 2013

1. Memperbaiki program perlindungan sosial Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga,kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya.Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.

2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan giziakan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan

antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya. Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin.

Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebihtinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap airbersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya. Sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk

miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

4. Menciptakan pembangunan yang inklusif Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanyadapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis.

Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri.Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakandan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus

didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melaluipasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

Adapun kemiskinan menurut pandangan Islam adalah suatu kondisi yang muncul akibat dari berbagai faktor, baik yang bersumber dari orang yang bersangkutan, maupun yang bersumber dari luar. Sumber dari orang yang bersangkutan berupa lemah atau tidak adanya upaya aktualisasi potensi-potensiyang ia miliki melaui kerja keras yang dapat melahirkan prestasi, termasuk juga adanya

kondisi pisik maupun psikis yang kondusif bagi terjadinya kemiskinan.

Sumber dari luar, meliputi adanya kondisi alam, sosial, dan struktural yang menyebabkan terjadi dan lestarinya kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari diri sendiri ditujukanterutama pada pemenuhan kebutuhan primer berupa makan dan minum serta dalam bentuk perlakuan baik yang dapat membesarkan jiwa serta menyadarkan potensi-potensi yang dimiliki yang belum teraktualisasikan dan kendala-kendala yang ada pada diri sendiri, serta penyediaan dana bantuan modal.

Adapun sebab terjadinya kemiskinan yang bersumber dari luar/alam, ditanggulangi dengan hijrah, usaha diluar kawasan tempat tinggal dan pengadaan serta pengaturan pengairan (sarana dan prasarana).[20]

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Para pemikir ekonomi syariah berbeda pendapat dalam memberikan kategori pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, namun dari berbagai perbedaan tersebut, pada dasarnya prinsip-prinsip dari ekonomi syariah yaitu:

a. Prinsip Tauhid

[20]Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan(PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Op. Cit, hlm. 38-42

Tauhid dalam ajaran agama Islam merupakan suatu yang sangatfundamental dan bahkan misi utama para Rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka penyampaian (*tabligh*) ajaran tauhid, menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepada-Nya.Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-Imran: 109 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلۡأُمُورُ ١٠٩

109. "Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan".[21]

Prinsip tauhid dalam ekonomi syariah sangat esensial sebab prinsip inimengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiannya (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan kepada Allah(hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Alquran.

d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud dalam ekonomi syariah berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, kebutuhan individu dan masyarakat, keselarasan antara lahir dan batin, serta mengandung makna keseimbangan dalam pendistribusian kekayaan melalui zakat, infaq, sedekah, waris, ghanimah, fai, kharaj, ushr dan

[21]Al-Qur'an Surah Ali-Imran, Ayat 109

sebagainya dalam hal untuk mencapai kesejahteraan. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Hadid: 7,sebagai berikut:

أَجْرٌ لَّهُمْ وَأَنفَقُوا مِنكُمْ وَءَامَنُوا فَلَّذِينَ فِيهِ مُسْتَخْلَفِينَ جَعَلَكُم مِّمَّا وَأَنفِقُوا وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ ءَامِنُوا
كَبِيرٌ ۝٧

> 7. "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar".[22]

e. Prinsip Khalifah

Manusia merupakan khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi yang harusmenjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sangpemberi mandat yaitu Allah swt., maka fungsi ini pula yang harus diterapkanoleh umat manuia dalam aktifitas perekonomiannya. Sebagaimana firmanAllah dalam QS. Al-Baqarah: 30 yaitu:

مَآءَ وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالُوا خَلِيفَةً لْأَرْضِ فِى جَاعِلٌ إِنِّى لِلْمَلَٰٓئِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ
تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّى قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ لدِّ ۝٣٠

30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."[23]

[22]Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat 7
[23]Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 30

f. Prinsip Keadilan

Dalam khazanah Islam, keadilan yang dimaksud adalah "keadilanilahi", yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilainilaitersebut merupakan suatu kewajiban sebagaimana firman Allah swt. QS.al-Maidah ayat 8:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[24]

Keadilan merupakan hal yang penting dalam mekanisme perekonomian syariah. Prinsip ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasul, dan juga berdasar pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keadilan dan keseimbangan.Adil dalam ekonomi dapat diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produkksi, perlakuan terhadap pekerja, serta segala hal yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.[25]

[24]Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 8

[25]Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan(PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Op. Cit, hlm. 45

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Nafkah kepada anak untuk memelihara dan pengasuhan baik pemberian itu berupa sandang, pangan, papan maupun pendidikan berdasarkan kemampuannya. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadist Nabi. Contoh dalam Al-Qur'an pada surah al-Baqarah (2) ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

228. "dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban, kewajiban istri merupakan hak bagi suami.Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau serata atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami.[26]

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

[26]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 159

Andaikan suami atau istri melailaikan kewajibannya, masing-masing pihak suami atau istri mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bilamana cara mengajukan gugatan dan sampai di mana batas-batas tanggung jawab suami dan istri yang dapat dituntut pelaksanaannya belum diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Demikian ditentukan dalam Bab VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[27]

Suami istri mempunyai kewajiban terhadap istrinya sebagaimana terdapat dalam pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melailaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.[28]

Pengertian dari ayat (1) disini adalah kewajiban suami yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu *Nafaqah*.*Nafaqah* merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *Nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi.Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah,* meskipun dilakukan suami terhadap istrinya.Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir.

---

[27]Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, (*Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004*)*, hlm. 188
[28]Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara, 2012), hlm. 12

Kewajiban memberikan *nafaqah* oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri.Prinsip ini mengitu alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi *nafaqah*. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima *nafaqah.*

Hukum membayar *nafaqah* untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat ke-pada keadaan istri.Bahkan di anatara ulam Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar *nafaqah*. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Dalil dalam bentul Al-Quran terdapat dalam beberapa ayat. Diantara ayat Al-Quran yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surah al-Baqarah (2) ayat 233:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Di antara ayat yang mewajibkan perumahan adalah surah at-Thalaq (65) ayat 6:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ ٦

6. tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.

Dengan telah dipenuhinya kebutuhan yang bersifat materi itu, dan ditunjang pula dengan pemenuhuan kebutuhan nonmateri, maka apa yang diharapkan dengan perkawinan itu akan dapat dicapai dengan izin Allah dan dengan itu pula tuntutan Allah untuk pendekatan diri kepanya dapat dilakasanakan.[29]

[29]Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Op. Cit, hlm. 166-167

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi lapangan. Penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (*Field Research*) ini diharapkan dapat menemukan jawaban tehadap kebijakan program keluarga harapan sebagai Pemutus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Desa Manunggang Jae.

Penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekaan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini erat kaitannya dengan pengamatan berperanserta. Peneliti lapangan pada lazimnya membuat catatan lapangan secara efektif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupkan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Nazir menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di teliti.

Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang yang dapat diamati.Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang diteliti secara *holistik*.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti ialah bertindak sebagai pengamat, artinya peneliti diharapkan bisa menggali informasi dengan cara observasi, wawancara dan pengamatan pada informan yang telah bergelut dalam Program Keluarga Harapan serta pengamatan terhadap Pengaruh PKH terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga di lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, peneliti melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan menurut peneliti lokasi tersebut terdapat kesalahan dalam memahami penggunaan bantuan PKH terutama kelalaian suami dalam menafkahi keluarga. Kegiatan tersebut terlihat jelas ketika

pencairan dana PKH banyak suami yang melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah maupun memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

E. Sumber Data Penelitian

Data ialah kenyataan; fakta, keterangan atau bahan dasar yang digunakan untuk menyusun hipotesa. Adapun data pada penelitian ini adalah hasil penelitian terhadap Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga.

Sumber data ialah kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data utama di catat melalui catatan tertulis atau melalui perekam.Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Sumber data pada penlitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti.Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan informan dan catatan di lapangan yang relevan dengan masalah penelitian. Informan-informan yang dipilih tersebut meliputi :

1) Informan yang mewakili UPPKH (Pendamping PKH) Desa Manunggang Jae :

a. Bapak Akhyar Rangkuti Pendamping PKH Tahun 2017 –Sekarang

2) Informan penerima bantuan PKH di Desa Manunggang Jae yang

mewakili :

a. Ibu Masyuni Simbolon Penerima bantuan PKH Tahun2019

b. Ibu Rosmilan Ritonga Penerima bantuan PKH Tahun2019

c. Ibu Kamisah Megawati Penerima bantuan PKH Tahun2019

3) Ibu Dini Bidan Desa di Desa Manunggang Jae Selaku Perwakilan dari Fasilitas Kesehatan

4) Bapak Siddik Harahap Kepala Desa di Desa Manunggang Jae Selaku Perwakilan yang Mengetahui Keadaan Masyarakat

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang mewakili populasi. Informan ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan menggunakan beberapa orang lain sebagai *keyinforman.*

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen- dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.

F. Teknik Analisis Data

Upaya memudahkan proses pencarian data yang benar-benar valid dan dapat

Dipertanggungjawabkan kebenarannya dari suatu masalah yang dibahas ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1) Analisis Induktif

Analisa yang berpedoman pada cara berfikir induksi, baik induksi konflik maupun tidak konflik yaitu suatu analisa yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit ditarik suatu generalisasi yang mempunyai sifat umum.

2) Analisis Deduktif

Analisa yang berpedoman pada cara berfikir deduktif yaitu suatu analisa yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum kemudian ditarik kepada pengetahuan khusus. Adapun definisi analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada oranglain.

Sedangkan dalam tekinik pengambilan data, penulis menggunakan beberapa langkah berikut :

a.Observasi

Pengamatan atau observasi juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri. Kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Peneliti mengobservasi bagaimana program keluarga harapan sebuah program

yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga sangat miskin khususnya di Desa Manunggang Jae.

b.Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara terencana dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam hal ini pihak yang diwawancarai atau informan adalah Pendamping PPKH Desa Manunggang Jae, yang mendapatkan bantuan PKH yang tidak mempunyai usaha dari pencairan dana PKH dan suami yang lalai dalam memberikan nafkah karena adanya pencairan dari PKH .

a. Dokumentasi

Dokumentasi atau catatan lapangan menurut Bogdan dan Biglen adalah catatan tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka mengumpulkan data refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.Bisa merupakan rekaman, bukan hanya yang tertulis, tetapi juga berupa gambar atau benda peningkatan yang berkaitan dengan suatu aktivitas atau peristiwa tertentu. Dalam dokumentasi peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang dilakukan di Desa

Manunggang Jae Kecamatan Kota Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dari berbagai sumber yang telah didapat tentunya harus diambil yang memiliki hubungan atau ada kaitannya dengan apa yang menjadi dasar penelitian ini, sehingga apabila terdapat sumber yang kurang sesuai atau bahkan tidak ada kaitannya sama sekali maka harus dipertimbangkan kembali atau bahkan tidak diambil.

Untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh dipenelitian ini valid dan bisa dipertanggungjawabkan, agar tidak terkesan fiktif, maka peneliti mengecek data temuan tersebut dengan tehnik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Keikut Sertaan

Dalam hal ini peneliti tinggal di lokasi penelitian sampai data – data yang diperlukan sudah terkumpul dan sudah menjawab semua pertanyaan peneliti.

b. Ketekunan Pengamatan

Berkaitan dengan proses analisis yang konstan dan mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menemukan peran atau manfaat program keluarga harapan dalam mengentaskan kemiskinan.

c. Trianggulasi

Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu sebagai komparasi terhadap data yang ada, trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara memanfaatkan sumber. Yaitu peneliti berusaha membandingkan data hasil pengamatan dengan data yang bersangkutan.

d. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.

e. Analisis Kasus Negatif

Hal ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan digunakan sebagai bahan pembanding.

f. Pengecekan Anggota

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang di cek dengan anggota yang terlihat meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan.

g. Uraian Rinci

Peneliti dituntut untuk melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan proses analisis yang konstan dan mencari apa yang dapat diteliti secermat mungkin.

h. Auditing

Proses auditing dapat mengikuti langkah-langkah seperti yang disarankan dalam hal-hal yang dapat diauditing, kesepakatan formal, dan terakhir penetuan keabsahandata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Desa Manunggang Jae

Adapun penduduk desa Manunggang Jae terdiri dari beberapa marga seperti: Harahap, Nasution, Lubis, Pane, Siregar, Siagian, Tanjung dan lain-lain. Masyarakat di ikat dengan adat istiadat dan seluruh penduduk menganut Agama Islam.Setiap desa memiliki pemimpin baik itu kepala desa, hatobangon, Harajaon, tokoh masyarakat, tokoh agama.

Adapun Bapak Siddik Harahap sebagai Kepala Desa mengatakan bahwa peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kewajiban suami memberi nafkah kepada keluarga sangat berpengaruh bagi masyarakat .

2. Keadaan Geografis

Pada masa kemerdekaan, Kota Padangsidimpuan merupakan Pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai bergabung kembali Kabupaten Mandailing Natal. Memulai aspirasi masyarakat pemerintahan tingkat II Kabupaten Selatan serta peraturan pemerintahan No. 32 tahun 1982 dan melalui rekomendasi DPRD Tapanuli Selatan No. 15/KPTS/1992 Kota Administratif Padangsidimpuan diusulkan menjadi Kota

Madya tingkat II, bersamaaan dengan pembentukkan kabupaten daerah tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas.

Maka diusulkan pembentukkan Kota Padangsidimpuan yang diterbitkan UU No. 4 tahun 2001 tentang pemebentukkan Kota Padangsidimpuan. Pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Medagri An. Presiden RI diresmikan Padangsidimpuan Menjadi Kota.

Kota Padangsidimpuan memiliki luas wilayah sebesar 1. 465.660Ha, terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Bataunadua, Kecamatana Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dari 18 Desa.Termasuk salah satunya desa Manunggang Jae yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Desa Manunggang Jae memilki wilayah 193 Ha. Batas-batas wilayah desa Manunggang Jae adalah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Perkebunan Pijor Koling
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Huta padang
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan Pijor Koling
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Pijor Koling

Jumlah peduduk pada desa Manunggang Jae dengan jumlah 1927 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 517 sebesar jiwa yang terdiri dari 997 jiwa laki-laki dan 930 jiwa perempuan.[30]

3. Keadaan Demografis

a. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Masyarakat desa Manunggang Jae adalah merupakan masyarakat yang mengutamakan agama dan adat sebagian dasar dalam segala aktivitas di masyarakat. Masyarakat mempunyai *Dalihan Na Tolu* yang merupakan ciri khas atau kaarifan lokal sebagaimana umunya pada masyarakat batak lainnya, dan telah memiliki kemajuan baik dalam berpikir maupun dalam berbudaya. Namun bagi sebagian warganya ingin menumpuh jenjang pendidikan lebih tinggi seperti SMP, SMA, maupun Perguruan Tinggi harus sekolah ke luar desa.

Dilihat dari tingkat pendidikan, maka penduduk desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara lebih banyak di jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

[30]Siddik Harahap, *Wawancara*, Kepala Desa, Tanggal 18Juni 2020

b. Pekerjaan Masyarakat

Masyarakat desa Manunggang Jae pada umumnya bekerja sebagai petani, baik petani sawah maupun perkebunan.dari desa ini Padi, Karet, Cokelat, serta sayur-sayuran cukup banyak masuk kepasaran. Berdasarkan data terbaru 2018, Tentang kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan data terbaru, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1.
Berdasarkan jenis pekerjaan Tahun 2019

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1	Petani	227
2	PNS	20
3	Pedangang	15
4	Kebun	50
	Jumlah	312

Sumber: data rekapitulasi kependudukan desa Manunggang Jae tahun 2018-2019

c. Keadaan Agama Masyarakat

Masyarakat desa Manunggang Jae seluruhnya adalah beragama Islam untuk menunjang aktivitas keagamaan masyarakat, di desa Manunggang Jae terdapat sarana dan prasaranan berupa mesjid dan surau dengan perincian sebagai berikut.

Tabel.2.
Sarana Keagamaan di desa Manunggang Jae

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Mesjid	2	Baik
2	Surau	2	Baik

Sumber:data rekapitulasi kependudukan desa Manunggang Jae tahun 2019

d. Keadaan Masyarakat Berdasarkan Etnis

Bila di tinjau dari segi etnis, maka masyarakat desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dilihat pada tabel berikut.

Tabel.3.
Keadaan penduduk desa Manunggang Jae berdasarkan etnis/suku

NO.	Nama Etnis/ Suku	Jumlah Jiwa
1.	Batak	1027 Jiwa
2.	Jawa	850 Jiwa
3.	Nias	50 Jiwa
4.	Lain-lain	Tidak di ketahui

Sumber: data rekapitulasi kependudukan desa Manunggang Jae tahun 2018-2019.

Jumlah peduduk pada desa Manunggang Jae dengan jumlah 1927 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 517 sebesar jiwa yang terdiri dari 997 jiwa laki-laki dan 930 jiwa perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, maka penduduk Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara lebih banyak di jenjang pendidikan Sekolah Dasar, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel.4.
Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Manunggang Jae

NO.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Sekolah Dasar	120
2	Sekolah Menengah Pertama/SMP	30
3	Sekolah Menengah Atas/SMA	40
4	Perguruan Tinggi	20
	JUMLAH	210

Sumber: data rekapitulasi kependudukan desa Manunggang Jae

2. Temuan Khusus

1. Peran Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kemampuan Suami Memberi Nafkah di Desa Manunggang Jae

Program Keluaraga Harapan atau yang biasa disebut PKH adalah program dari kementrian sosial yang awal mulanya didirikan pada tahun 2007. Namun pada saat pertama kali didirikan program keluraga harapan tersebut program ini hanya mencakup beberapa kota besar yang ada do Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Palembang belum mencakup seluruh Indonesia. Namun setelah mencoba di beberapa kota tersebut dirasa program keluarga harapan mempunyai dampak yang cukup bagi perekonomian masyarakat yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan sehingga pada tahun 2013 kementrian sosial mensosialisasikan bahwa bantuan program keluarga harapan sudah merata di seluruh Indonesia. Salah satunya

di Kota Padangsidimpuan termasuk di Desa Manunggang Jae bantuan program keluarga harapan berjalan sejak tahun 2013 sampai sekarang bantuan program keluarga harapan sudah berjalan sekitar 5-6 tahun.

Tabel.5.
PenerimaProgramKeluargaHarapan(PKH)

No	Nama	Umur
1	Masyuni Simbolon	43
2	Duma Sari	36
3	Ridawati	47
4	Masriani Lubis	34
5	Tinayan Harahap	46
6	Nursaini Harahap	47
7	Nurleli	42
8	Nurhawani Lubis	37
9	Dahlena Nasution	39
10	Irma Suryani Hrp	32
11	Rosmilan Ritonga	42

12	Mariasna	39
13	Nirwana	43
14	Asnawati Pohan	34
15	Masnijar	47
16	Nurkholidah Pane	36
17	Siti Apasah	45
18	Aminah Nasution	49
19	Dahrina Lubis	32
20	Tetti Rawati	32
21	Eva Mildayani	38
22	Sahlani Lubis	39
23	Rosima Pane	41
24	Mariannum	35
25	Nilmatilopa Rambe	32
26	Sarma Nasution	36
27	Erlina Harahap	36

28	Robiatussania	48
29	Nongga Sari	47
30	Masni Dalimunthe	37
31	Berlian	49
32	Leli Diana	34
33	Kamisah Megawati	27
34	Siti Zahrani	42
35	Syamsiyah Hasibuan	34
36	Emma Sari Pane	37
37	Renisopianti Tanjung	35
38	Nurjannah	32
39	Novitayanti Tarioran	35
40	Mastur Lubis	32
41	Eva Gustina Pohan	31
42	Miska Khairani	29
43	Siti Devi	34

44	Maswarni	34
45	Perak Gultom	49
46	Sarima	33
47	Anita Namora Hrp	38
48	Oktariani	29
49	Leli Asna	46
50	Yanti Pohan	28
51	Lenni Marida Pohan	30
52	Rodiani Pane	33
53	Robiatul Khoiriyah	36
54	Nur Aminah Hsb	47
55	Nurliana Hsb	43
	Jumlah	55

Sumber:datarekapitulasikependudukandesaManunggangJae

Di Desa Manunggang Jae terdapat 55 keluarga yang terdaftar sebagai peserta PKH, dimana keluarga tersebut memiliki anggota keluarga antara lain ibu hamil, anak usia balita, anak yang bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program Keluarga Harapan (PKH) di gulirkan di Kota Padangsidimpuan untuk merespons permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di Desa Manunggang Jae.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Padangsidimpuan khususnya yang terdapat di Desa Manunggang Jae untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup dalam meningkatkan kewajiban suami memberi nafkahyang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga sangat miskin (RTSM). Dapat disadari sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Program Keluarga Harapan di Desa Manunggang Jae telah berjalan mulai tahun 2013 sampai sekarang. Setiap pengurus dari rumah tangga miskin peserta PKH dihadiri oleh suami sebagai kepala rumah tangga yang rata-rata berpendidikan rendah bahkan banyak diantara mereka tidak bisa membaca dan menulis tetapi semangat mereka untuk selalu mengikuti pertemuan bisa dibilang cukup tinggi. Meskipun mereka tidak berpendidikan tetapi mereka diberi arahan untuk memiliki skil dalam membuka usaha untuk mensejahterakan ekonomi keluarga, sehingga kelak mereka bisa memiliki masa

depan yang lebih baik. Namun tidak jarang juga ada suami yang tidak peduli dan bahkan membiarkan ekonomi keluarga terpuruk.

Oleh karena itu, PKH diharapkan mampu merubah pola pikir suami sebagai kepala keluarga tentang pentingnya kesejahteraan hidup ekonomi keluarga sehingga mereka mampu membuka usaha baru yang meningkatkan taraf hidup keluarga dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-sebaiknya. Kutipan wawancara bersama dengan pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Manunggang Jae,

1) Informan yang mewakili UPPKH (Pendamping PKH) Desa Manunggang Jae :

a. Bersama Bapak Akhyar Rangkuti Pendamping PKH Desa Manunggang Jae

pendamping adalah sebagai fasilitator atau jembatan untuk menyalurkan bantuan dari kemensos supaya bantuan tersebut tepat sasaran kepada penerima bansos atau bantuan PKH, dan pendamping sebagai pengguna data harus bisa memastikan bahwa data-data tersebut yang turun dari pusat harus valid dan sesuai dengan target, seperti biasanya data penerima bantuan seperti KK, NIK,NAMA, DLL, masih belum valid sehingga kami sebagai pendamping harus membenarkan data tersebut melaluiyang ada di desa Manunggang Jae ini. Dan yang harus kita kerjakan sebagai pendamping PKH yang pertama kita hrus Verifikassi, kedua Validasi, ketiga menyalurkan bantuan dan keempat pertemuan kelompok, nah di pertemuan kelompok tersebut kita dituntut untuk bisa mengubah mindset mereka sebagai penerima bantuan untuk bisa bangkit dan bisa memutus tali kemiskinan dengan memanfaatkan bantuan yang ada, salah satunya sebagai pendamping kami juga dituntut agar penerima bantuan (KPM) mempunyai usaha minimal entah usaha kelompok atau usaha sendiri untuk membantu meringankan beban kehidupan mereka sehingga mereka bisa sedikit demi sedikit melepas tali kemiskinan yang menjerat mereka. Jumlah bantuan yang diterima bervariasi mulai dari Rp.300.000 sampai Rp 2.000.000 tergantung jumlah anak di dalam keluarga dan berapa yang orang yang sedang menempuh pendidikan, balita

dan ibu hamil di dalam keluarga tersebut, apabila mempunyai anak balita dan anak dalam bangku sekolah dasar dan anak di bangku SMP maka bantuan yang diterima Rp. 1.800.000, dan apabila hanya mempunyai satu anak yang sedang duduk di bangku sekolah hanya mendapat Rp. 300.000[31]

Pendamping adalah jembatan untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat yang ditujuk langsung untuk mengetahui keadaan dan situasi ekonomi masyarakat sebelum mendapat bantuan dan pemberian arahan kegunaan dana yang di cairkan kepada penerima PKH.

2) Informan penerima bantuan PKH di Desa Manunggang Jae yang

b. Bersama Ibu Masyuni Simbolon Penerima PKH di Desa Manunggang Jae

Penerima adalah pihak yang memperoleh bantuan pencairan dari dana PKH, dimana saya pribadi penerima PKH menggunakan uang pencairan PKH untuk kebutuhan sehari-hari, benar adanya pendamping PKH menyampaikan agar dana yang di cairkan di gunakan untuk membuka usaha baru yang mana katanya untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Desa Manunggang Jae. Akan tetapi kenyataannya saya tidak menggunakannya karena ada kebutuhan keluarga yang lebih mendesak dan yang harus ditutupi, dan dengan adanya uang dari PKH bisa membantu suami saya meningkatkan pemberian nafkah kepada keluarga kami karena tidak hanya dari penghasilannya saja untuk semua kebutuhan kami.[32]

Dari hasil wawancara Ibu Masyuni Simbolon sangat berterima kasih kepada Pemerintah telah mengeluarkan bantuan berupa uang dan sembako untuk keluarganya karena sangat membantu perekonomian meski tidak dapat meningkatkan namun dapat meringankan beban suami dalam memberi nafkah.

[31]Akhyar Rangkuti, Pendamping PKH, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2020
[32]Mayuni Simbolon, Penerima PKH, *Wawancara*, Tanggal 21 Juni 2020

b. Bersama Ibu Rosmilan Ritonga Penerima PKH di Desa Manunggang Jae

Penerima adalah pihak atau orang yang menerima dana dari PKH, bahwa saya benar salah satu dari penerima bantuan PKH yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan setiap satu kali tiga bulan kami anggota penerima PKH ada pertemuan dengan pendamping PKH langsung. Dipertemuan tersebut pendamping menyampaikan agar menggunakan uang PKH untuk membuka UKM yang menjadi cirri khas di Desa Manunggang Jae, namun yang saya jalani sampai saat ini belum bisa menggunakan uang tersebut untuk membuka usaha baru, karena uang tersebut saya manfaatkan untuk biaya pendidikan anak-anak saya, misalnya untuk bayar SPP dan untuk keperluan lainnya. Sedangkan sembago yang saya terima saya gunakan untuk makanan sehari-hari dan tidak saya manfaatkan membuka usaha baru, padahal dari apa yang diberikan bisa untuk saya modalkan, tetapi kenyataannya hanya untuk kepentingan rumah tangga bukan menambah pendapatan di dalam keluarga saya.[33]

Dari apa yang disampaikan Ibu Rosmilan Ritonga menyatakan dengan adanya bantuan dana dan sembako bisa mengurangi beban suami dalam memberi nafkah, meski uang yang di cairkan belum dapat digunakan untuk modal usaha tapi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya.

c. Bersama Ibu Kamisa Megawati penerima PKH di Desa Manunggang Jae

Penerima adalah orang yang mendapat pencairan dana dari PKH, saya adalah salah satu penerima PKH di Desa Manunggang Jae ini, dan Alhamdulillah dari dana pencairan PKH yang ada bisa saya manfaatkan untuk membuka usaha baru untuk saya sendiri meski masih usaha kecil-kecilan, namun uang yang diberikan bisa jadi modal utama bagi saya, saya memanfaatkannya untuk membuat kripik sambal, kripik pisang dan saya antar ke warung-warung yang ada di Desa Manunggang Jae, Saya tidak hanya memanfaatkan uang tersebut untuk modal tapi juga untuk kebutuhan keluarga, setelah saya punya usaha tersebut pendapatan di keluarga saya lumayan, intinya bisa menutupi kebutuhan pokok kami tanpa harus membebankan kepada orang lain.[34]

Dari Ibu Kamisa Megawati dapat memodalkan atau membuka usaha baru dengan adanya uang yang dicairkan Pemerintah meski usaha kecil-kecilan dan mampu menambah penghasilan keluarga.

---

[33]Rosmilan Ritonga, Penerima PKH, *Wawancara,* Tanggal 21 Juni 2020
[34]Kamisa Megawati, Penerima PKH, Manunggang Jae, *Wawancara,* Tanggal 21 Juni 2020

3) Bersama Ibu Dini Bidan Desa di Desa Manunggang Jae Selaku Perwakilan dari Fasilitas Kesehatan

Saya adalah bidan desa yang menangani fasilitas kesehatan pada masyarakat Desa Manunggang Jae, dimana masih banyak masyarakat yang tidak terlalu mementingkan kesehatan dengan berobat ke medis dengan alasan biaya. Saya selaku bidan desa yang ditugaskan untuk meninjau kesehatan masyarakat disini cukup memperihatinkan dengan keadaan ekonomi yang kurang memadai, karena penghasilan masyarakat yang masih sangat rendah, namun dengan adanya program yang digulirkan oleh Pemerintah berupa uang kepada masyarakat, ekonomi lemah kebawah sangat membantu dan dengan adanya peraturan Pemerintah bahwa ibu melahirkan harus dibawa ke puskesmas atau klinik sangat berdampak baik bagi masyarakat, karena dengan adanya peraturan tersebut masyarakat lebih memperhatikan kesehatannya, karena kesehatan salah satu faktor penunjang baiknya ekonomi masyarakat itu sendiri.[35]

Dari hasil wawancara dengan bidan desa, beliau menyatakan ada kemajuan bagi masyarakat dalam memperhatikan kesehatan terutama bagi ibu yang akan melahirkan, karena dengan adanya uang masukan bisa meringankan masyarakat untuk biaya berobat.

4) Bapak Siddik Harahap Kepala Desa di Desa Manunggang Jae Selaku Perwakilan yang Mengetahui Keadaan Masyarakat

Saya adalah kepala desa di Desa Manunggang Jae, yang mana saya sangat tahu bagaimana keadaan masyarakat saya terutama keadaan ekonominya, desa ini bisa dibilang dengan penghasilan yang cukup rendah karena kebanyakan masyarakat hanya sebagai petani dan penderes, apalagi keadaan harga getah yang cukup murah membuat penghasilan masyarakat melemah, namun dengan adanya pencairan dana PKH mampu menambah masukan untuk keluarga yang membutuhkan dan di manfaatkan sebagai penambahan pendapatan keluarga bukan hanya untuk dihabiskan ketika uang PKH itu di cairkan. Saya sebagai kepala desa sangat berterima kasih kepada Pemerintah karena telah menggulirkan bantuan yang cukup meringankan beban masyarakat saya utamanya dalam menangani keadaan ekonomi yang cukup lemah, dan mampu membantu meringankan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.[36]

[35]Dini, Bidan Desa Manunggang Jae, *Wawancara*, Tanggal 18 Juni 2020
[36]Siddik Harahap, Kepala Desa, *Wawancara*, Tanggal 18 Juni 2020

Kesimpuan dari hasil wawancara dengan bapak Siddik Haraharap sekaligus kepala desa sangat berterima kasih kepada Pemerintah karena telah menggulirkan bantuan yang sangat mendukung untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Berdasarkan data dan hasil wawancara bersama pendamping program keluarga harapan dan KPM PKH, Program keluarga harapan di Desa Manunggang Jae dilakasanakan mulai tahun 2013. Jumlah penerima program keluarga harapan setiap tahunnya terus bertambah hingga tahun 2018 sejumlah 55 KPM PKH yang tersebar di Desa ManunggangJae . Menurut informan pendamping PKH dan KPM PKH ada beberapa tahapan dalam peran Program Keluarga Harapan di Desa Manunggang Jae . Tahapan-tahapan tersebut antara lain :

1) Verifikasi

2) Validasi

3) Sosialisasi / Pertemuan Awal

4) Pencairan / Penyaluran Bantuan

5) Pembentukan Kelompok

6) Pertemuan Kelompok

7) Pemutakhiran Data Peserta PKH

Wawancara dengan bapak Akhyar Rangkuti pendamping PKH di Desa Manunggang Jae :

Jadi ada banyak tahapan yang dilaksanakan sebelum peserta PKH itu menjadi KPM PKH, ada tujuh tahapan yang harus dilalui, pertama data itu turun dari pusat kemudian pendamping pkh berkoordinasi dengan pihak desa atau kelurahan setelah koordinasi baru ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sesuai pedoman PKH yaitu : verifikasi, validasi, pertemuan awal, pencairan, pembentukan kelompok, pertemuan kelompok, dan yang terakhir pemutakhiran data.

Jadi, proses atau tahapan – tahapan penerima bantuan PKH ini yang pertama adalah verifikasi data penerima bantuan di Desa Manunggang Jae dengan pihak desa terkait yang ada di Desa Manunggang Jae, hal tersebut untuk memastikan bahwa penerima bantuan memang layak dan benar-benar kategori dalam keluarga sangat miskin untuk mendapatkan bantuan PKH sehingga perlu adanya verifikasi kepada pihak desa terkait supaya bantuan tepat sasaran.

1. Verifikasi

Proses verifikasi ini dilakukan oleh pendamping untuk para calon penerima bantuan program keluarga harapan seperti kutipan wawancara dengan pendamping PKH di Desa Manunggang Jae bapak Akhyar Rangkuti sebagai berikut :

jadi tahapan atau proses awal itu verifikasi data sebelum calon penerima bantuan itu di data jadi kami pendamping melakukan verifikasi kepihak desa untuk memastikan bahwa data penerimabenar-benar akurat dan memang berasal dari keluarga sangat miskin, karena kadang-kadang banyak data yang tidak akurat seperti misalkan terkadang calon penerima PKH tu sudah meninggal, ada yang sudah pindah tempat, ada yang sudah menerima bantuan PKH (double) terkadang juga sudah ada yang mampu, makanya penting verifikasi itu untuk memastikan bahwa calon penerima itu benar-benar layak seperti kriteria yang ada dalam pedoman PKH, jika data dari pusat yang turun itu kita verifikasi kepihak desa ternyata orangnya sudah meninggal, pindah, double, atau mampu maka pendamping PKH kecamatan berhak untuk menghapus bantuan tersebut.

2. Validasi

Setelah proses verifikasi maka prosess selanjutnya adalah proses validasi, menurut selaku pendamping PKH Desa Manunggang Jaeproses validasi dilakukan oleh masing-masing pendamping PKH Kecamatan yang sudah di tunjuk ke beberapa desa dampingan masing-masing pendamping, proses validasi biasanya dilaksanakan di balai desa dan validasi dilakukan dengan cara menginput data melalui aplikasi berbasis androit dari kementrian sosial yaitu E-PKH, setelah itu para calon penerima bantuan PKH dimintai dokumen penting seperti fotokopi kartu keluarga (KK) dan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP). Selain validasi dengan menginput data melalui aplikasi androit, pendamping PKH juga harus mengisi formulir yang sudah di berikan langsung dari pusat untuk masing-masing calon penerima bantuan PKH yang kemudian formulir tersebut di kirimkan kepada sekertariat PKH Kota Padangsidimpuan, sedangkan data yang di input di aplikasi androit langsung di terkirim secara otomatis kepusat. Kemudian data-data tersebut diolah oleh pusat yang kemudian akan diturunkan kembali untuk ditetapkan menjadi peserta PKH,seperti kutipan wawancara dengan pendamping PKH di Desa Manunggang Jae bapak Akhyar Rangkuti sebagai berikut :

jadi proses yang kedua adalah validasi, validasi ini dilakukan oleh setiap pendamping PKH untuk menginput data dari aplikasi E-PKH yang kemudian data tersebut langsung terkirim secara otomatis ke pusat dan pendamping juga harus mengisi formulir untuk setiap calon PKH dan kemudian formulir tesebut di serahkan ke sekretariat PKH yang ada di Kota Padangsidimpuan, calon penerima bantuan PKH wajib melampirkan beberapa dokumen seperti fotokopi KK dan KTP untuk diserahkan dan melengkapi persyaratan validasi, kemudian setelah proses validasi selesai maka data akan diolah oleh pusat dan akan diturunkan kembali kepada pendamping untuk di data dan sudah resmi untukmenjadi penerima bantuan PKH atau KPM PKH. Setelah itu barulah pendamping melakukan sosialisasi tentang PKH

dan melaksanakan pertemuan awal bagi para penerima bantuan (KPM PKH baru) yang sudah diresmikan oleh pusat dengan surat edaran dari kementrian sosial.

3. Sosialisasi / Pertemuan awal

Menurut Akhyar Rangkuti proses selanjutnya setelah verifikasi data adalah mengadakan sosialisasi atau pertemuan awal anatara pendamping PKH kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan penerima bantuan (KPM PKH baru). Pertemuan awal ini diisi dengan sosialisasi program keluarga harapan yaitu pendamping menyampaikan tentang bagaimana program keluarga harapan, tujuan program keluarga harapan, fungssi program keluarga harapan visi dan misi program keluarga harapan serta tugas dan fungsi pendamping PKH dan Penerima bantuan PKH, hak dan kewajiban sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan serta aturan-aturan yang ada dalam Program Keluarga Harapan, maka para penerima bantuan program keluarga harapan harus mematuhiaturan-aturan yang berlaku. Kutipan wawancara dengan Akhyar Rangkuti pendamping PKH di Desa Manunggang Jae,

sosialisasi atau pertemuan awal yang dilaksanakan pendamping program keluarga harapan ini snagat penting supaya para penerima tahu akan tugas dan fungsi, hak dan kewajiban mereka sebagai peserta PKH atau penerima bantuan PKH, karena nantinya pendamping PKH dan peserta PKH setiap sekali tiga bulan harus melakukan pendampingan (pertemuan kelompok) untuk sosialisasi dan mengontrol para peserta PKH agar bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan semestinya sesuai aturan yangtelah ditetapkan oleh pusat. Karena pertemuan kelompok tersebut setiap bulannya harus dilaporkan oleh pendamping PKH kepada sekretariat PKH untuk mengontrol seluruh kegiatan penerima bantuan, jadi bantuan PKH ini bantuan bersyarat dimana penerima bantuan tersebut kita arahkan dan kita bantu, dengan adanya pertemuan kelompok jadi bantuan ini bukan bantuan seperti yang lainnya setelah mendapat bantuan langsung sudah tidak ada sosialisasi dan edukasi. Kalau bantuan PKH ini setiap pertemuan kelompok pendamping harus mengedukasi penerima bantuan PKH dengan materi-materi yang sudah ditetapkan oleh pusat seperti materi cara mengelola keuangan, cara mendidik anak dll, selain itu dalam pertemuan kelompok tersebut pendamping PKH bisa melihat prospek dan kreatifitas para penerima bantuan PKH karena bantuan ini juga dituntut agar peserta PKH

mampu mempunyai usaha dan diberdayakan dengan difasilitasi oleh pendamping masing-masing untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi mereka.

4. Pencairan/penyaluran Bantuan PKH

Peran selanjutnya adalah penyaluran bantuan, bantuan PKH disalurkan secara bertahap setiap 3 bulan sekali, pencairan tersebut melalui bank BNI, setiap penerima bantuan mendapatkan buku rekening serta ATM atas nama pribadi kemudian bantuan tersebut langung cair ke nomor rekening masing-masing KPM PKH. Adapun jumlah bantuan PKH yang diterima oleh setiap KPM PKH sama rata yaitu tahap satu pencairan mendapatkan sebesar 500 ribu rupiah perorang, tahap dua mendaapatkan bantuan sebesaar 500 ribu rupiah hingga tahap tiga juga mendapatkan sebesar 500 ribu rupiah, namun untuk tahap keempat para menerima hanya mendapatkan bantuan sebesar 390 ribu rupiah.

Namun jumlah nominal bantuan tersebut berubah-ubah setiap ada peraturan baru yang disahkan oleh kementrian sosial, untuk bantuan selanjutnya pada tahun 2019 bantuan berubah menjadi perkomponen artinya semakin banyak komponen didalam keluarga tersebut maka semakin banyak nominal bantuan yang didapatkan. Penyaluran bantuan di kecamatan Padangsidimpuan Tenggara disalurkan pada bulan Maret, Mei, Agustus dan November untuk pencairan tahun 2018.Berikut hasil interview bersama Ibu Masyuni Simbolon penerima PKH di Desa Manunggang Jae,

pencairan itu dilakukan 4 kali tahapan, per tiga bulan sekali biasanya pencairan kami(KPM PKH) langsung ke bank BNI bareng-bareng. Tahap 1-3 cairnya 500 ribu rupiah, untuk tahap 4 cairnya 390 ribu rupiah, dan uang bantuan itu kami pergunakan untuk anak sekolah beli tas, buku, sepatu atau apapun yang diperlukan anak sekolah, keperluan rumah tangga, namun ada sebagian dari kami penerima PKH yang menggunakannya untuk membuka usaha kecil-kecilan, misalnya jualan kripik, lontong dll.

5. Pembentukan Kelompok

Selanjutnya yaitu pembentukan kelompok, para penerima bantuan program keluarga harapan di bagi menjadi kelompok-kelompok kecil, kelompok ini dibagi atas kesepakatan para penerima bantuan dan pendamping PKH setiap kelompok minimal teerdiri dari 15 orang maksimal terdiri dari 25 orang, pembagian kelompok dimaksudkan agar memudahkan dalam proses komunikasi terkait program keluarga harapan antara pendamping PKH dan penerima bantuan PKH. Kelompok yang sudah terbentuk nantinya akan ada ketua, wakil sekertaris dan bendahara, setiap kelompok kemudian akan melakukan pertemuan kelompok rutin setiap tiga bulan sekali dengan didampingi oleh pendamping PKH kecamatan Padangsidimpuan Tenggara untuk membahas masalah dan sosialisasi serta memberikan informasi terkait program keluarga harapan, serta mengontrol seluruh kegiatan dan bantuan para penerima bantuan PKH.

Pertemuan kelompok ini nantinya setiappendamping akan memberikan materi secara langsung kepada para KPM PKH tentang tata cara megelola keuangan, mendidik anak dll seuai dengan arahan dan aturan yang udah ditetapkan oleh kementrian sosial. Banyak manfaat yang didapatkan pada pertemuan kelompok salah satunya

pendamping bisa memberikan motivasi pada para penerima bantuan PKH dan mengontrol bagaimana mereka bisa aktif dalam kegiatan yang sudah difasilitasi oleh program ini seperti kegiatan sekolah bagi KPM yang memiliki anak usia sekolah dan kegiatan kesehatan bagi KPM yang hamil, mempunyai anak balita, lansia dan disabilitas. Pendamping PKH dalam pertemuan kelompok juga memberikan arahan serta bimbingan bagi KPM PKH yang mempunyai usaha kecil serta kelompok yang mempunyai usaha bersama hal ini tujuannya semata-mata hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para penerima bantuan PKH. Pertemuan kelompok ini biasanya juga disebut dengan FDS *(Family Development Session*).Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Akhyar Rangkuti selaku Pendamping PKH di Desa ManunggangJae:

Jadi pembentukan kelompok ini merupakan tahapan kelima dalam PKH ini karena pembentukan kelompok sangat penting untuk memudahkan komunikasi antara pendamping PKH dan para penerima bantuan, dengan adanya kelompok nantinya akan dibentuk ketua, wakil, sekretaris dan bendahara hal itu memudahkan jika ada iuran kelompok untuk bikin suatu kreatifitas atau produk yang ingin mereka buat, memangtidak besar karena kita mulai ini dari kecil dulu yang diharapkan nantinya bisa berkembang menjadi lebih baik dan dapat membantu mereka dalam masalah ekonomi meskipun sedikit setidaknya kita sudah membantu dan bisa memberdayakan mereka dengan adanya kelompok ini. Selain itu nanti semua informasi dan masalah akan dibahassemua pada pertemuan kelompok serta materi-materi yang sudah didapat oleh pendamping nantinya akan disampaikan kepada para penerima bantuan, selanjutnya dalam pertemuan kelompok pendamping bisa mengontrol para komponen mereka dalam kegiatan sekolah dan kesehatan apakah sudah terpenuhi dengan baik atau tidak. Karena setiap bulan pendamping akan verifikasi pendidikan dan kesehatan di sekolah-sekolah tempat para komponen belajar dan di polindes tempat mereka berobat.Jadi, menurut pendamping PKH hal ini sudah dilaksanakan dan memang mepunyai dampak positif bagi program karena dengan adanya pertemuan kelompok pendamping bisa mengontrol para penerima bantuan PKH secara langsung.

6. Pertemuan Kelompok

Implementasi selanjutnya yaitu pertemuan kelompok, pertemuan kelompok ini sama seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak Akhyar Rangkuti selaku pendamping PKH

Desa Manunggang Jae bahwa pertemuan kelompok dilakukan rutin setiap tiga bulan sekali untuk mempermudah komunikasi antara pendamping dalam berkomunikasi seputar program keluarga harapan dengan para penerima bantuan. Banyak manfaat yang diterima oleh pendamping serta KPM PKH dalam pertemuan kelompok yaitu :

Manfaat bagi pendamping PKH dan Manfaat bagi penerima bantuan PKH :

a) Memudahkan dalam mengontrol perkembangan KPM PKH

b) Memudahkan dalam menyampaikan informasi dan materi terkait PKH

c) Memudahkan dalam membina KPM PKH dalam mengelola kelompok usaha bersama

7. Pemutakhiran Data Peserta PKH

Pemutakhiran data KPM PKH dilakukan tiga bulan sekali hal ini untuk memperlancar tahapan pencairan, karena pemutakhiran tersebut bertujuan untuk mengontrol dan mengupdate data KPM PKH. Pemutakhiran dilakukan oleh setiap pendamping dengan mengupdate data KPM PKH yang mungkin diantara komponen PKH tersebut ada ibu hamil yang sudah melahirkan, atau anak sekolah yang sudah naik kelas serta update data –data yang lain yang berhubungan dengan PKH.

Pemutakhiran data ini termasuk implementasi yang memantau ulang komitmen para penerima bantuan PKH terhadap pendidikan dan kesehatan, karena ketika pemutakhiran data yang dilakukan oleh pendamping, pendamping harus berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah maupun bidan desa yang ada di Desa tersebut sehingga pendamping tahu apakah para penerima bantuan PKH memang berkomitmen terhadap pendidikan dan kesehatan yang telah diosialisasikan ketika

pertemuan awal. Sehingga pemutakhiran data ini dilakukan setiap tiga bulan sekali tujuannya untuk memantau komitmen para KPM PKH. Berikut kutipan wawancara bersama bapak Akhyar Rangkuti terkait pendamping PKH Desa Manunggang Jae:

setiap pendamping harus memutakhirkan data setiap KPM PKH yang ada di desa dampinganyang kemudian hasil pemutkhiran data tersebut kami setorkan kepada operator PKH untuk diolah, pemutkhiran data dilaksanakan seiap 3 bulan sekali untuk mengupdate data-data KPM PKH terutama data komponen KPM PKH seperti ibu hamil, anak sekolah, balita dll. Dalam pemutakhiran data pendamping harus keliling ke polindes yang ada didesa untuk memutakhirkan data kesehatan dan sekolah-sekolah untuk memutakhirkan data pendidikan KPM PKH. Jika ada KPM PKH yang tidak aktif dalam komitmenmereka dalam pendidikan dan kesehatan langkah pertama yang pendamping lakukan adalah mencari tau penyebab kenapa mereka tidak menjalankan komitmen, dan langkah kedua memberikan pemahaman dan mengingatkan agar hak serta kewajiban (komitmen) dilaksanakan dengan benar, tapi ketika sudah diperingatkan tetapi mereka para KPM PKH tetap tidak menjalankan komitmen mereka maka langkah selanjutnya pendamping berhak menghapus bantuan tersebut dengan alasan bahwa KPM PKH tersebut tidak menjalankan komitmen serta hak dan kewajibnnya dengan benar meskipun sudah di ingatkan berkali-kali, namun untuk PKH di Desa Manunggang Jae, sejauh ini belum ada KPM PKH yang tidak melaksanakan komitmen mereka, mereka aktif dan semangat dalam menjalankan komitmen mereka masing-masing.

Jadi, menurut keterangan informan bahwa pemutakhiran sangat penting dalam menunjang dan mengupdate data-data para penerima bantuan, dan sampai akhir ini dari keterangan para pendamping belum ada KPM PKH yang tidak menjalankan komitmen mereka karena KPM PKH yang ada di Desa Manunggang Jae mereka sangat aktif berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang ada dalam program keluarga harapan ini.

Dari beberapa implementasi diatas terdapat beberapa hal lain yang terkait dengan konsep dan implementasi program keluarga harapan (PKH) di Desa Manunggang Jae yaitu :

1. Kementrian sosial berfungsi untuk menetapkan kriteria dan syarat penerima program keluarga harapan dan mengontrol berjalannya program keluarga harapan melalui laporan pendamping PKH.
2. Pemerintah daerah berperan dalam pelasksanaan program keluarga harapan diwilayah pemerintahnnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pusat.
3. Pendamping PKH bertugas untuk melaksanakan tahapan program diwilayah yang ditugaskan sesuai dengan SK yang telah ditetapkan oleh pusat yaitu mendampingi para penerima bantuan, membuat laporan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama sebulan sekali.
4. Peneriama bantuan atau keluarga penerima manfaat yaitu masyarakat yang mendaparkan bantuan PKH yang berkewajiban melaksanakan kewajibannya yaitu dalam kegiatan pendidikan dan kesehatan, pertemuan kelompok dan menerima seluruh haknya yaitu dalam menerima bantuan serta mendapatkan motivasi dan edukasi terkait program keluarga harapan.
5. Bank berperan dalam penyaluran bantuan sebagai penyedia jasa keuangan sehingga penerima bantuan dapat menerima haknya secara langsung.

Mengacu pada hasil wawancara yang didukung dengan data yang ada menunjukkan bahwa peran program keluarga harapan berpengaruh terhadap peningkatan kewajiban suami memberi nafkah keluarga, dengan adanya program keluarga harapan ini kesejahteraan masyarakat di Desa Manunggang Jae dapat memberikan pengaruh yang positif untuk kelanjutan hidup mereka sehari-hari.

2. Peningkatan Kemampuan Suami Memberi Nafkah Setelah Mengikuti Program Keluarga Harapan di Desa Maunggang Jae

a. Kemampuan Membuka Usaha Baru

Setelah menerima bantuan PKH, ada 13 keluarga yang memanfaatkan bantuan PKH untuk membuka usaha baru, usaha tersebut diantaranya adalah pembuatan keripik sambal, jualan lontong, warung kopi atau jual makan-makanan ringan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada ibu Kamisa Megawati, Dahrina Lubis, Sarima, dan Erlina Harapan. Para beliau mengatakan mampu membuka usaha baru yaitu membuat keripik sambal sampai menjualnya ke warung-warung dan ke desa-desa lain dengan menggunakan modal dari bantuan PKH,

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Rodiani Pane, Anita Namora Harahap, Asnawati Pohan, Eva Mildayani. Para beliau mengatakan mampu membuka usaha baru yaitu jualan lontong, gorengan dll setelah menerima bantuan PKH karena bantuan yang diterima di manfaatkan sebagai modal usaha.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Perak Gultom, Sarma Nasution, Lenni Marida pohan, Masni Dalimunthe, Masnijar. Para beliau mengatakan mampu membuka usaha baru yaitu membuka warung kopi atau

menjual makan-makanan ringan, dengan menggunakan modal dari bantuan PKH yang diterima.

b. Biaya Pendidikan Anak

Setelah menerima bantuan PKH, ada 23 keluarga yang memanfaatkan bantuan tersebut untuk biaya pendidikan anak.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Masyuni Simbolon, Duma Sari, Ridawati, Nursaini Harahap, Rosmilan Ritonga, Nirwana, Nurkholidah Pane, Nilmatilopa Rambe, Robiatussania, Nongga Sari, Leli Diana, Siti Zahrani, Syamsiyah Hasibuan, Emma Sari Pane, Nurjannah, Maswarni, Siti Devi, Robiatul Khoiriyah, Nurliana Hsb, Leli Asna, Eva Gustina Pohan, Aminah Nasution, Tinayan Harahap. Para beliau mengatakan uang bantuan yang di cairkan PKH di manfaatkan untuk membayar pendidikan anak yang di antaranya, pembayaran SPP, pembayaran uang makan dll. Stelah mengikuti bantuan PKH beliau mengatakan lebih meringankan beban untuk biaya pendidikan anak.

c. Kebutuhan Pokok

Setelah menerima bantuan PKH, ada 19 keluarga yang memnfaatkan bantuan tersebut untuk kebutuhan pokok dan memperbaiki gizi keluarga dan membeli pakaian.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Masniari Lubis, Nurleli, Nurhawani Lubis, Dahlena Nasution, Irma Suryani Harahap, Mariasna, Nirwana, Siti Apasah, Tetti Rawati, Sahlani Lubis, Rosima Pane, Berlian, Renisopianti Tanjung,

Mastur Lubis, Miska Khairani, Oktariani, Yanti Pohan, Nur Aminah Hasibuan. Para beliau mengatakan uang bantuan yang diterima di manfaatkan untuk menopang kehidupan misalnya, memenuhi kebutuhan pokok, memperbaiki gizi dan untuk membeli pakaian. Beliau juga mengatakan dengan adanya bantuan PKH sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya.

Masyarakat di Desa Manunggang Jae yang menerima bantuan dari PKH merasa mampu meningkatan kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada keluarga, karena bisa dilihat langsung dari hasil wawancara penerima PKH mengakui adanya peningkatan atau meringankan beban suami dalam memberi nafkah kepada keluarga. Bahkan ada yang sudah mampu membangun usaha kecil-kecilan dengan suaminya guna sebagai peningkatan dalam memberi nafkah untuk keluarganya. Hasil survei yang dilakukan oleh peneliti di Desa Manunggang Jae terlihat bahwa kewajiban suami dalam memberi nafkah keluarga setelah mengikuti dan menerima bantuan PKH terdapat peningkatan dan kemajuan yang lebih baik dari sebelumnya.

Besarnya bantuan yang diterima sangat bervariasi, tergantung jumlah anak yang sedang sekolah, balita, atau ibu hamil di dalam keluarga tersebut, apabila anaknya yang duduk di bangku sekolah dasar ada 3 orang namun jumlah yang di hitung tetap satu orang, dan besarnya bantuan yang diterima adalah :

1. Ibu hamil Rp. 800.000
2. Balita Rp. 700.000
3. Sekolah Dasar Rp. 450.000
4. Sekolah Menengah Pertama Rp. 300.000
5. Dan Sekolah Menengah Atas Rp. 200.000[37]

[37]Akhyar Rangkuti, Pendamping PKH, *Wawancara*, Tanggal 11 September 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peran program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kemampuan suami dalam memberi nafkah di Desa Manunggang Jae. Program Keluarga Harapan di Desa Manunggang jae telah berjalan mulai tahun 2013 sampai sekarang. Setiap pengurus dari rumah tangga miskin peserta PKH dihadiri oleh istri yang rata-rata berpendidikan rendah bahkan banyak diantara mereka tidak bisa membaca dan menulis tetapi semangat mereka untuk selalu mengikuti pertemuan cukup tinggi. Meskipun mereka tidak berpendidikan tetapi mereka diberi arahan untuk memiliki skil dan membuka usaha untuk mensejahterakan ekonomi keluarga, sehingga kelak mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Namun tidak jarang juga ada suami yang tidak peduli dan bahkan membiarkan ekonomi keluarga terpuruk.Oleh karena itu, PKH diharapkan mampu merubah pola pikir suami sebagai kepala keluarga tentang pentingnya kesejahteraan hidup ekonomi keluarga sehingga mereka mampu membuka usaha baru yang meningkatkan taraf hidup keluarga dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Jumlah penerima program keluarga harapan setiap tahunnya bertambah hingga tahun 2018 sejumlah 55 KPM PKH yang terbesar di Desa Manunggang Jae. Menurut informan pendamping PKH dan KPM

PKH ada beberapa tahapan dalam peran Program Keluarga Harapan di Desa Manunggang Jae. Dengan demikian terlihat bahwa adanya peran PKH dalam meningkatkan kewajiban suami dalam member nafkah keluarga. Program Keluarga Harapan sangat berperan penting dalam meningkatkan kewajiban suami memberi nafkah karena sangat membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sangat meringankan beban suami, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah.

2. Peningkatan kemampuan suami memberi nafkah setelah mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Manunggang Jae. Masyarakat di Desa Manunggang Jae yang menerima bantuan dari PKH merasa mampu meningkatan kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada keluarga, karena dapat dilihat langsung dari hasil wawancara penerima PKH mengakui adanya peningkatan atau meringankan beban suami dalam memberi nafkah kepada keluarga. Bahkan ada yang sudah mampu membangun usaha kecil-kecilan dengan suaminya guna sebagai peningkatan dalam memberi nafkah untuk keluarganya. Hasil survei yang dilakukan oleh peneliti di Desa Manunggang Jae ada 65 persen keluarga yang merasa dapat membantu suaminya dalam meningkatkan pemberian nafkah dengana adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikeluarkan Pemerintah, namun 35 persen merasa uang tersebut tidak mampu meningkatkan pendapatan suami terutama member nafkah kepada keluarganya. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti

terlihat jelas adanya perbedaan pendapat masyarakat dalam menanggapi dana PKH yang dikeluarkan Pemerintah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Peran Program Keluarga (PKH) dalam meningkatkan kewajiban suami memberi nafkah di Desa Manunggang Jae, peneliti perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah agar lebih mempertegas atau memperjelas data-data penerima PKH guna agar tidak salah sasaran dan menegaskan kepada pendamping agar benar-benar memberikan arahan yang membuka pola pikir penerima untuk memanfaatkan bantuan menjadi penambah penghasilan dan membuat laporan yang valid saat pertemuan dengan penerima PKH.
2. Diharapkan kepada pendamping PKH agar lebih menegaskan lagi tentang kegunaan uang yang diterima oleh KPM PKH.
3. Diharapkan kepada pendamping PKH agar mengajari KPM PKH untuk membuka usaha baru guna untuk keluar dari tali kemiskinan, bukan hanya memerintahkan namun ikut terjun langsung untuk usaha yang akan dikelola oleh KPM PKH.
4. Diharapkan kepada masyarakat yang menerima PKH agar dapat memanfaatkan uang yang diterima untuk mencari usaha yang bisa

5. menambah penghasilan keluarga agar tidak terjerat dalam kemiskinan dan tidak hanya menggunakan uangnya untuk keperluan sehari-hari.

DAFTAR FUSTAKA

Padangsidimpuan, Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa, 28 Januari 2020.

Qur'an Surah Al-Ma'un, Ayat 1-7.

UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kementrian Sosial RI (2016b), Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2016. Jakarta, Indonesia.

Putri Sofyan Sari, Masyarakat, *Wawancara*, Desa Manunggang Jae 13 November 2019.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Pemerintah Indonesia.

M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ibnu Sosial*, Bandung :Eresco, t.th.

Dyah Ayu Virgoreta, dkk, "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat",* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No 1.

Hasil wawancara atas nama Aliamin HSB, Tanggal 03-Desember-2019, Jam 20.00.

Hasil wawancara atas nama Khoiruslan Harahap, Tanggal 05-Desember-2019, Jam 08.30.

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial KEMENTERIAN SOSIAL RI, *Pedoman Pelaksanaan PKH*, 2019.

Munawwarah Sahib, *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan(PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*“, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Zainuddin Ahmad, *Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan,* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.

Farida dan Sri, *“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal”, Vol 2, No 6 2018*.

Peraturan Mentri Sosial Nomor 146 Tahun 2013

Al-Qur’an Surah Ali-Imran, Ayat 109.

Al-Qur’an Surah Al-Hadid Ayat 7.

Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 30.

Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 8.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004.

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara, 2012.

Siddik Harahap, *Wawancara*, Kepala Desa, Tanggal 18Juni 2020.

Akhyar Rangkuti, Pendamping PKH, *Wawancara,* Tanggal 20 Juni 2020.

Mayuni Simbolon, Penerima PKH, *Wawancara,* Tanggal 21 Juni 2020.

Rosmilan Ritonga, Penerima PKH, *Wawancara,* Tanggal 21 Juni 2020.

Kamisa Megawati, Penerima PKH, Manunggang Jae, *Wawancara*, Tanggal 21 Juni 2020.

Dini, Bidan Desa Manunggang Jae, *Wawancara*, Tanggal 18 Juni 2020.

LAMPIRAN




KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
KELUARGA
RA SEJAHTERA


KEMENTERIAN
REPUBLIK INDO
PEMKO PADANGSI
KELUAR
PRA SEJAH
PENERIMA BAP
1. PKH
2. SEMBA


YOUTH
1913




SOP
PENCAPAIAN